

Daya tangkapnya yang demikian tajam, membuat A. Wahid Hasyim kecil memiliki banyak hafalan dari pokok-pokok ajaran sang ayah, yang diperoleh sambil bermain. lebih-lebih setelah dididik sang ayah. Demikian pula ketika A. Wahid kecil itu mulai belajar bahasa Belanda, modalnya diperoleh dari menirukan uraian-uraian Imam Sukarlan, Guru bahasa Belanda di Madrasah "salafiyah" yang terletak di komplek Tebuireng. Di tempat ini juga akhirnya A. Wahid Hasyim menjadi dewasa.

Studi-studinya tidak hanya terbatas pada pelajaran kitab-kitab kuning Islam klasik. Keterbukaannya untuk mempelajari berbagai macam keilmuan menjadi kebiasaan sejak kecil. Pada usia 17 tahun A. Wahid hasyim memperdalam pengetahuannya di Makkah. Sekembalinya di Tebuireng pada tahun 1929, beliau mempelajari Bahasa Inggris dan Belanda, serta berlangganan berbagai majalah. Kesediaannya untuk membaca majalah tidak hanya terbatas dari kalangan tradisional saja, tetapi juga majalah yang diterbitkan oleh kalangan nasionalis dan majalah terbitan Timur Tengah.

Hal yang menarik perhatian juga bahwa sejak mudanya Kiai A. Wahid Hasyim telah melibatkan diri dengan pola pikiran dari kelompok-kelompok masyarakat

dari golongan yang luas. Hal ini memudahkan kita untuk dapat memahami kenapa Kiai A. Wahid Hasyim kelak menjadi pemain yang kreatif bagi pemunculan dan perkembangan Negara Indonesia modern (Zamakhshari Dhofeir, 1994:105).

Berbagai ilmu dalam pengembangannya beliau sangat rajin belajar di perpustakaan, di tempuh secara self studie, belajar sendiri. Oleh sebab itu tidak mengherankan jika Kiai A. Wahid Hasyim mempunyai pengetahuan umum dalam bidang sejarah, pengetahuan alam, filsafat, politik, ekonomi, seni budaya, dan lain-lain, serta dilengkapi kesediaannya untuk berlangganan majalah dan surat kabar milik kaum muslimin modern dan kelompok "Nasionalis" menggambarkan pribadinya yang progresif dan sikapnya yang telaten dalam persoalan-persoalan ideologi sosial dan politik.

Kemampuannya untuk membaca tidak terbatas dalam bentuk tulisan dalam buku, tetapi juga masalah-masalah kemasyarakatan. Kritiknya terhadap orang-orang terpelajar yang tidak peka terhadap masalah-masalah kemasyarakatan: "Kebanyakan orang cuma bisa membaca buku-buku kecil dengan huruf kecil a-b-c-d dan alif-ba-ta-tsa, tetapi tidak bisa membaca buku-buku besar dengan huruf besar. Masyarakat dengan segala permasalahannya adalah

buku-buku besar dengan pelaku utamanya barupa orang-orang dalam masyarakat ibarat huruf besarnya". Kemampuan tersebut sangat membantu Kiai A. Wahid Hasyim dalam mengembangkan kemajuan pesantrennya.

2. Perjuangan dan Karir Politik KH.A. Wahid Hasyim

Sejak tahun 1938 KH.A. Wahid Hasyim mulai aktif sebagai peminan Nahdlotul Ulama (NU), organisasi yang dipelopori oleh ayahnya sendiri, yakni KH.M. Hasyim Asy'ari. Sejak itu beliau lebih memilih sebagai politikus dari pada sebagai seorang pemimpin pesantren. Dalam tubuh NU, beliau mula-mula duduk sebagai wakil ketua *tanfidhiyah* yang menangani masalah-masalah politik dan pemerintahan.

Walaupun NU adalah organisasi yang dipimpin ayahnya sendiri, namun Kiai A. Wahid Hasyim aktif di dalamnya bukan karena keturunan, pengaruh orang lain, dan lain-lain. Sejak kepulangan Kiai A. Wahid Hasyim dari Makkah, beliau sudah mempertimbangkan dan mencari-cari organisasi atau partai yang sesuai untuk wadah perjuangan politik beliau. Ada kemungkinan bagi Kiai A. Wahid Hasyim untuk mendirikan organisasi baru atau memasuki organisasi yang telah ada. Pada tahap pertama

beliau mendirikan "Ikatan Pelajar Islam" (IPI) yang digunakan sebagai wadah penggemblengan politik bagi pemuda (A. wahid Hasyim,1985;101)

Sebagai tokoh dalam NU, maka Kiai A. Wahid Hasyim bersikap anti kolonialisme dan anti kapitalisme. Dengan sendirinya beraspirasi kemerdekaan Indonesia. Letak perbedaannya dengan tokoh-tokoh nasionalisme, jika mereka ini berjuang dengan memakai "bahasa politik", maka Kiai A. Wahid Hasyim dengan tokoh-tokoh NU yang lain berjuang dengan memakai "bahasa" Islam. Sebab itu tidaklah mengherankan mengapa beliau bersama tokoh-tokoh NU yang lain memperjuangkan hapusnya subsidi pemerintah belanda di Indonesia kepada sekolah-sekolah Islam. Memperjuangkan beban-beban pembiayaan bagi calon haji, serta menuntut perlakuan kepada mereka secara patut penghapusan biaya karamtina bagi para calon haji. Juga penghapusan biaya penyembelean ternak untuk korban pada hari raya Idul Adha. Juga menuntut kepada pemerintah agar para pejabat yang diangkat dalam kedudukan-kedudukan pada kantor-kantor kepenghuluan atau kehakiman dipilih oleh orang-orang yang mempunyai standar pengetahuan hukum Islam, dan akhlak Islam serta pengetahuan yang lain (Syaifuddin Zuhri,1983:208)

Pada tahun 1939 Kiai A. Wahid Hasyim dipilih menjadi ketua Dewan Islam A'la Indonesia (MIAI), sebagai badan federasi atau gabungan dari partai-partai politik dan ormas-ormas Islam seperti: PSII, Partai Islam Indonesia, Muhamadiyah, PERSIS, Al-Irsyad, NU dan lain-lain. Kiai A. Wahid Hasyim memegang jabatan ketua MIAI hingga datangnya pemerintahan Jepang. Dan sebagai anggota yang lain adalah Abi Kusno Cokro Suyoso, Dr Soekiman Wondoamiseno, KH. Mas Mansur, KH. Abdul Kahar Mudzakir, Moch. Nasir dll.

Prestasi MIAI selama di bawah pimpinan KH.A. Wahid Hasyim, berhasil menjalin hubungan antara umat Islam Indonesia dengan umat Islam di Jepang. Juga mengadakan kerja sama dengan tokoh-tokoh GAPPI dalam Majlis Rakyat Indonesia, dengan tujuan untuk mencapai Kemerdekaan Indonesia yang adil dan makmur.

Menurut Kuntawijoyo dalam bukunya "Dinamika Sejarah Umat Islam" halaman 25 menyebutkan Peran Serta Kiai A. Wahid Hasyim dalam kepemimpinan Shumubu (Kantor Urusan Agama) di Jakarta. Shumubu di bentuk oleh Jepang pada tahun 1943, dan pada tahun 1944 Kiai A. Wahid Hasyim ditunjuk untuk memimpinya, mewakili ayahnya yang secara resmi tidak bisa meninggalkan Tebuireng.

Pada waktu itu beliau masih berumur 24 tahun. Kedudukan yang di sandang Kiai A. Wahid Hasyim ini berakhir sampai akhir pendudukan Jepang bulan Agustus 1945.

Perjuangan Politik kiai A. Wahid Hasyim sangat tampak, ketika beliau diangkat menjadi anggota BPUPKI. Dalam keanggotaan tersebut beliau termasuk salah satu anggota yang berpengaruh, sehingga kemudian beliau diikuti sertakan dalam keanggotaan "Panitia Sembilan". Ketika menjelang Kemerdekaan RI juga ikut sebagai anggota PPKI. Dalam masalah ini akan dikupas dalam pembahasan berikutnya.

Semasa pendudukan Jepang Kiai A. Wahid Hasyim merupakan tokoh sentral di kalangan umat Islam. Seperti halnya dengan tokoh-tokoh Nasional yang lain seperti Ir Soekarno, Dr Moh Hatta, Mr Moh Yamin, Ki hajar Dewantara, Iskandardinata, Sukarjowiryopranoto, Mr Dr Sopo-
mo, R.P. Suroso.

Politik terselubung yang dilakukan oleh Kiai A. Wahid Hasyim di zaman Jepang ialah: Pengambil unsur kekuasaan Jepang yang positif bagi perjuangan mencapai kemerdekaan Indonesia. Dengan kata lain menggunakan pengaruh Jepang untuk menghantam Jepang sendiri (Choirul Anam, 1985:121). Sejak kedatangan kekuasaan bala

Dalam Masyumi Kh A. Wahid Hasyim juga pernah memegang jabatan ketua Dewan Pertahanan Partai yang langsung memimpin markas "Hisbullah" yang diketuai oleh Zainul Arifin dan markas tertinggi "Barisan Sabilillah" yang diketuai oleh KH. Masykur (Deliar Noer, 1987:34). Berhubung dengan tugasnya didalam partai masyumi selaku tokoh teras baik dalam bidang politik maupun pertahanan (militer), maka Kh.A. Wahid Hasyim diangkat oleh panglima besar Sudirman selaku penasehat pribadinya.

Perjuangan politik Kh. A. wahid Hasyim sangat tampak, ketika beliau diangkat menjadi anggota BPUPKI, yang kemudian diangkat sebagai anggota panitia sembilan. ketika menjelang kemerdekaan, sebagai anggota PPKI. Dalam masalah ini akan dikupas pada pembahasan berikutnya.

Menurut Ensiklopedi Indonesia (1982:1266) KH. A Wahid Hasyim pernah menjabat sebagai menteri dalam empat periode, yaitu Menteri negara (1945), Menteri Agama dalam kabinet RIS (1949-1950), Menteri Agama dalam Kabinet Natsir (1950-1951), dan Menteri Agama dalam Kabinet Sukiman (1951-1952).

Menjadi Menteri Agama dalam Kabinet RIS, Menteri Agama yang pertama yang mengorganisasi penyelenggaraan

jamaah haji Indonesia sebagai proyek Nasional yang dikoordinasi oleh Menteri Agama, dan mendirikan Yayasan Perjalanan Haji Indonesia (PHI). Pencetus gagasan pendirian Masjid Istiqlal, dan ketika tidak lagi menjabat sebagai menteri Agama gagasan tersebut diambil alih oleh Presiden Soekarno dan dilaksanakan oleh menteri-menteri Agama sesudahnya (Syarifuddin Zuhri, 1983:42).

Bersama-sama KH. Abdul Wahab Hasbullah memelopori NU keluar dari partai "Masyumi" karena tidak menyetujui pelaksanaan demokrasi partai di dalam Masyumi, hingga akhir NU menjadi partai Politik pada tahun 1951 dan Kh. A. Wahid Hasyim terpilih sebagai ketua umum Partai NU.

"Meskipun lebur asal di jalan Allah" inilah semboyan yang disebarkan untuk membangkitkan semangat juang oleh KH. A. Wahid Hasyim, hingga akhir hayatnya dalam usia belum 40 tahun. Kepergiannya menyebabkan seluruh ulama dan dunia Pesantren menjerit dan meratap. Hal itu juga dirasakan oleh pimpinan-pimpinan lainnya antara tahun 1954-1960 yang sering kali melontarkan keluan "Seandainya Kh. A. Wahid Hasyim masih ada ..." ketika menghadapi soal-soal yang pelik yang sulit dihadapi.

B. Konsep Dasar Negara Menurut K.H.A. Wahid Hasyim

Agaknya cukup sulit untuk memperoleh gambaran yang orisinal tentang gagasan dan pemikiran K.H.A. Wahid Hasyim dalam masalah ideologi negara Indonesia merdeka. Salah satu sebabnya ialah M. Yamin tidak menyertakan pidato atau catatan lengkap yang dibuat oleh para pemimpin Islam, seperti: K.H.A. Wahid Hasyim, Ki Bagus Hadikusumo, Mansyur, Kahar Muzakir atau H. Agus Salim, selama sidang-sidang BPUPKI berlangsung. Padahal catatan pidato lain dari kalangan nasionalis dimuat cukup rapi dan lengkap.

Kajian terhadap pemikiran dan gagasan kalangan Islam mengenai negara yang akan dibentuk hanya dimungkinkan dengan melihat reaksi mereka terhadap kalangan nasionalis. Padahal untuk kepentingan ini seharusnya amat perlu melacak gagasan dan pikiran mereka secara orisinal, bukan hanya reaksi mereka saja. Begitulah maka kajian ini tidak bisa mengelakkan realitas ini karena kurangnya sumber-sumber asli tersebut.

Suatu hal yang tidak dapat dielakkan, bahwa motifasi perjuangan K.H.A. Wahid Hasyim dalam pembelaan negara adalah untuk memperjuangkan berlakunya Hukum Islam di tanah air dengan orientasi lembaga kekuasaan politik, sebab dengan lembaga itu, maka hukum Islam lebih dimungkinkan untuk dapat difungsikan, karena

memerlukan perangkat lembaga politik (Ali Haidar,1994:97). Dengan demikian ideologi negara yang dapat menegakkan kekuasaan politik Islam adalah ideologi negara menurut Islam, dengan tidak mengabaikan pentingnya persatuan yang kokoh bagi kemerdekaan Indonesia. Menurut K.H.A. Wahid Hasyim, yang paling penting di awal kemerdekaan adalah persatuan bangsa yang kokoh dan teguh. Bagaimana caranya menempatkan agama Islam di Indonesia merdeka, dengan tidak mengendorkan persatuan bangsa yang sangat perlu waktu itu (A. Wahid Hasyim,1982:97)

K.H.A. Wahid Hasyim adalah tokoh yang sejak semula dengan keras mengajukan tuntutan mengenai dasar negara yang formalitas Islam, di samping menanggapi dan mempersoalkan bagaian-bagaian tertentu dari gagasan kaum nasionalis dalam sidang BPUPKI (Ali Haidar,1994:95)

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa konsep ideologi negara menurut K.H.A. Wahid Hasyim adalah ideologi Islam, yang diperjuangkan selama sidang-sidang BPUPKI dan PPKI, serta diakomodasikan dengan kepentingan bangsa yang sangat mendasar pada waktu itu. Persatuan dan kesatuan adalah hal yang sangat penting pada waktu itu

C. Peran perjuangan KH.A. Wahid Hasyim Dalam Penyusunan Dasar Negara RI

Peran perjuangan KH.A. Wahid Hasyim dalam penyusunan dasar negara RI dapat ditelusuri dari perjalanan sidang BPUPKI dan PPKI, sebagai badan yang bertugas membahas permasalahan tersebut.

Sidang Badan Penyelidik diselenggarakan dua kali, yang pertama tanggal 29 Mei-2 Juni 1945 dan yang kedua tanggal 10-14 Juli 1945. Pada kesempatan sidang pertama, sidang diwarnai oleh pidatonya M.Yamin, Supomo, dan Soekarno. Isi pidato tersebut pada umumnya mengemukakan *dasar filosofi*, batas negara, dan garis besar rancangan UUD serta bentuk negara. Masalah yang paling crucial dalam hal ini adalah tentang dasar negara.

Perdebatan paling tajam dalam sidang BPUPKI ketika membahas dasar negara. Nasionalis sekuler di bawah pengaruh kekuatan Barat yang hegemonik secara politik, militer, dan ekonomi, berhadapan dengan kekuatan Islam yang laten dan tidak mau terdudukkan.

Golongan Islam tentu saja menginginkan agar dasar negara Indonesia nantinya adalah Islam, minimal hukum Islam merupakan hukum yang menjiwai secara

aspiratif kepada hukum-hukum yang berlaku di Indonesia. Sedangkan golongan anasionalis atau kebangsaan pada garis besarnya menginginkan dipisahkannya urusan-urusan kenegaraan dengan keagamaan. Bagi golongan ini persatuan adalah utama dibandingkan dengan persoalan-persoalan lainnya. Konsep paling tepat yang mereka kemukakan adalah konsep negara sekuler, suatu paham yang menginginkan terpisahnya kehidupan duniawi dan kerohanian, antara agama dan negara (Wahidin dan Abdurrahman, 1984:40)

Dalam kesempatan itu wakil Islam hanya terdiri dari 15 orang, hanya 25 persen dari 62 aggotanya. Kelompok inilah yang memperjuangkan ideologi Islam sebagai dasar negara.

Dari pihak nasionalis, pada sidang pertama diisi pidatonya M. Yamin, seorang yuris, ahli hukum, ahli sejarah dan sastrawan, mengemukakan lima sila dasar negara: peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan dan peri kesejahteraan sosial (keadilan sosial) (Risalah Sidang, 8-15)

Sedangkan Supomo dalam pidatonya lebih menekankan masalah pemisahan antara agama dan negara, Dengan mengutip pendapatnya Hatta. Dengan demikian Supomo

dan Hadis. Juga di kutuip pendapatnya Ali al-Roziq⁴ yang dikatakan lebih radikal, bahwa al-Qur'an terpisah dari hukum yang mengenai kepentingan negara.

Supomo ingin melepaskan masalah negara dari ikatan salah satu agama, dikhawatirkan ada pihak-pihak yang merasa tersisih. Cita-cita negara Islam menurutnya tidak sesuai dengan cita-cita negara kesatuan yang diidam-idamkan dan juga dianjurkan oleh bala tentara Jepang (Risalah Sidang:1995:33). Supomo menganjurkan pembentukan negara nasional yang bersatu, yang mengata-si segala golongan dan akan mengindahkan dan menghorma-ti keistimewaan segala golongan, baik golongan besar maupun golongan kecil.

Pada tanggal 1 Juni Soekarno mengemukakan lima asas dasar negara, yaitu peri kebangsaan, peri kemanu-siaan, peri permusyawaratan melalui perwakilan (demo-krasi), Peri kesejahteraan dan ketuhanan. Pidato ini

4. Ali al-Roziq, seorang pemikir Islam yang berco-rak sekulerisme, berpendirian bahwa al-Qur'an tidak mengatur masalah politik dan negara. Aliran ini menolak pendasaran politik pada Islam atau paling tidak menolak determinasi bentuk negara (politik) pada Islam (Syifulloh. 1997:11)

kemudian terkenal dengan istilah "lahirnya Pancasila", selanjutnya Pancasila Soekarno ini disingkat menjadi trisila: Peri kebangsaan dan poeri kemanusiaan disebut sosio nasionalisme, demokrasi dan kesejahteraan disebut sosio demokrasi, dan ketuhanan. Seluruh asas ini kemudian diringkas menjadi satu: Gotong Royong.

Dalam penjelasannya mengenai sila ketiga, permusyawaratan perwakilan, Soekarno mengemukakan: "untuk pihak Islam, inilah tempat terbaik untuk memelihara agama. badan perwakilan inilah tempat kita untuk mengemukakan tuntutan-tuntutan Islam (Risalah Sidang, 1995:70)

Rupanya pidato dari Soekarno dan Supomo ini diawali dengan pendapatnya pihak nasionalis Islami sehingga keduanya lebih menekankan penolakan terhadap dasar negara Islam dan pendirian negara atas nama Islam di Indonesia.

Perdebatan sengit tentang ideologi negara dan perdebatan tajam antara nasionalis sekuler dan nasionalis muslim, menghantar terbentuknya "Panitia Sembilan" untuk membicarakan perbedaan lebih lanjut. Panitia ini terdiri atas lima orang nasionalis sekuler: Soekarno, Hatta, Ahmad Subarjo, Moh. Yamin, dan A.A. Maramis.

Sedangkan golongan Islam diwakili oleh H. Agus Salim, KH.A. Wahid Hasyim, Abi Kusno, Abdul Kahar Mudzakkir (Yamin,1959:115)

Soekarno, selaku ketua panitia kecil mengakui kesulitan-kesulitan yang dihadapi panitia untuk menemukan dua golongan, Islam dan kebangsaan, terutama masalah agama dan negara. Selanjutnya Panitia Sembilan inilah yang berhasil merumuskan suatu persetujuan kompromi antara kedua belah pihak, yang oleh Sukiman disebut *Gentlemen Agreement*, dan Yamin menyebutnya dengan istilah *Jakarta Charter* atau *Piagam Jakarta* (Risalah Sidang,1995:213)

Dalam Piagam Jakarta tersebut terdapat rumusan dasar negara sebagai berikut: Ketuhanan, dengan berke-
wajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-
pemeluknya, menurut dasar kemanusiaan yang adil
dan beradap, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang
dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permsyawaratan
perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan
sosial bagi seluruh rakyat indonesia.

Kemudian Latuharhari dari golongan protestan keberatan dengan kalimat yang terdiri dari tujuh kata dengan kewajiban menjalankan Syari'at Islam bagi

pemeluk-pemeluknya. Akibatnya mungkin besar terhadap agama lain. Karena itu diminta supaya dalam UUD diadakan pasal yang terang. Karena kalimat ini bisa pula menimbulkan kekacauan misalnya terhadap adat istiadat. Agus Salim menjawab, pertikaian hukum agama dengan hukum adat bukan masalah baru dan pada umumnya telah selesai. Ketentraman orang-orang yang beragama lain tidak perlu dirisaukan, keamanan mereka tidak tergantung kepada kekuasaan negara, tetapi dari adat umat Islam yang 90 persen.

Kontroversi mengenai tujuh kata itu terus berlangsung, Soekarno yang berkali-kali menegaskan bahwa kalimat itu merupakan kompromi yang bisa dicapai dengan susah payah. "Kalau kalimat ini tidak dimasukkan, tidak dapat diterima oleh umat Islam" (M.Yamin, 1959:259).

Beberapa orang lainnya menyampaikan keberatannya. Wongsonegara menyatakan keberatannya, didukung oleh Hoesen, Djajadiningrat, bahwa anak kalimat tersebut mungkin menimbulkan fanatisme, karena seolah-olah memaksa menjalankan Syariat Islam bagi orang-orang Islam.

Kali ini K.H.A. Wahid Hasyim tampil menjawab dan mengingatkan mereka pada dasar permusyawaratan, ... paksaan-paksaan tidak bisa terjadi. Bila ada orang yang menganggap kalimat ini tajam, ada juga yang menganggap kurang tajam (Yamin,1959:259). Soekarno mengulangi lagi bahwa anak kalimat ini merupakan kompromi antara golongan Islam dan golongan kebangsaan, yang di dapat dengan susah payah.

Namun ketika sidang membicarakan detail pasal-pasal UUD, A. Wahid Hasyim mengaitkan salah satu inti yang telah disepakati mengenai agama negara. A. Wahid Hasyim mengusulkan perubahan pasal 4 ayat 2 agar hanya orang yang beragama Islam yang dapat diterima sebagai presiden dan wakil presiden; dan agama negara adalah Islam. dengan jaminan kemerdekaan bagi penganut agama lain untuk beribadat menurut agama masing-masing.

Pentingnya kedua hal tersebut menurut A. Wahid Hasyim untuk menjamin terciptanya peraturan yang berciri atau berbau Islam dengan alasan karena umumnya pertahanan negara yang didasarkan kepada keyakinan agama akan sangat hebat, karena menurut ajaran Islam orang hanya boleh mengorbankan jiwanya untuk ideologi Islam.

Tuntutan KH.A. Wahid Hasyim ini agak mengejutkan, sebab sejak semula kemungkinan akan timbul persepisan dalam hal ini, juga di pihak Islam sendiri, mengingat sejarah masa lalu Islam yang tidak pernah bersatu. KH.A. Wahid Hasyim menulis dalam *Menjelang Indonesia Merdeka*, 25 Mei 1945, mengatakan: "sekali lagi saya ulangi: yang sangat kita butuhkan saat ini adalah persatuan bangsa yang tidak terpisahkan".

Tuntutan tersebut menambah panasnya suasana sidang, semua pihak menolak usulan tersebut, termasuk juga A. Salim. Akan tetapi Masykur menegaskan tuntutan yang sejalan dengan rekannya, A. Wahid Hasyim bahwa arti dari tujuh kata dalam preambule itu hanya mungkin terlaksana secara nyata jika presiden dan wakil presiden adalah orang Islam, jika diakui Islam sebagai agama negara, dan jika presiden dan wakil presiden bersumpah menurut agama Islam, bukan menurut agama"nya", kata "nya" menurut Masykur memberi arti presiden tidak harus beragama Islam. Soekarno mengusulkan kompromi dengan menghilangkan kata "menurut agamanya". Suatu kompromi menurut Soekarno tidak harus 100 persen, harus memberi dan menerima (Risalah Sidang, 1995:205)

Suasana yang terjadi makin menegangkan. Diusulkan agar diadakan pamungutan suara untuk mendapat keputusan agar persidangan tidak berlarut-larut. Akhirnya tujuh kata dalam piagam Jakarta itu dihapus dengan cara lobi dari pihak nasionalis sekuler kepada salah seorang yang hadir dalam sidang PPKI. Pada kesempatan tersebut dari pihak Islam dihadiri oleh Ki Bagus Hadikusumo.

Sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 semula direncanakan mulai jam 09.30 diundur sampai dua jam untuk memberi kesempatan kepada Hatta, yang ditugaskan oleh golongan nasionalis sekuler guna melakukan perundingan dan lobiing secara tidak normal dengan wakil umat Islam. Satu-satunya wakil umat yang hadir dalam sidang PPKI tersebut hanyalah Ki Bagus Hadikusumo, sebab KH.A. Wahid Hasyim pada saat itu masih berada di Jawa Timur. Hatta yang didampingi oleh Teuku Mohammad Hasan dari utusan Aceh mencoba meyakinkan Ki Bagus Hadikusumo agar mau menyetujui perubahan yang ada dalam pembukaan Undang-undang Dasar (Piagam Jakarta), khusus anak kalimat " dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Selama hampir dua jam

Hassan yang sebelumnya tidak pernah mengikuti sidang, tidak tahu bagaimana susahinya memperjuangkan tujuh kata tersebut, akhirnya berhasil membujuk Ki Bagus Hadikusumo (Abdul Qodir Djaelani, 1996:94)

Setelah Ki Bagus dapat diyakinkan, sidang dimulai. Dalam pidato pembukaannya, Soekarno, ketua sidang menekankan arti historik saat itu dan mendesak agar PPKI bersidang secara kilat, dan menginginkan para anggota agar tidak bertele-tele dalam masalah detail, tetapi memusatkan perhatian mereka hanya pada garis-garis besarnya saja. Agenda pada pagi hari itu terbatas hanya pada pembicaraan beberapa perubahan penting dalam pembukaan dan batang Tubuh UUD, Hatta dipersilahkan untuk menyampaikan perubahan-perubahan, yaitu:

1. Kata "Muqoddimah" diganti dengan kata "Pembukaan"
2. Dalam preambule (Piagam Jakarta), anak kalimat : dengan berkewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya, diubah menjadi "berdasarkan atas ketuhanan Yang Maha Esa".
3. Pasal 6 ayat 1 : "Presiden ialah orang Indonesia dan beragama Islam", kata-kata "dan beragama Islam" dicoret.

Setelah membicarakan perubahan-perubahan tersebut, Hatta menyatakan keyakinannya: "Inilah perubahan yang maha penting yang menyatukan segala bangsa". Setelah mengambil alih pimpinan, Soekarno menambahkan bahwa Undang-undang itu dibuat untuk sementara. Ucapannya: "Nanti kita bernegara dalam suasana yang lebih tenteram, kita tentu mengumpulkan kembali Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dapat membuat Undang-undang yang lebih baik dan sempurna (Risalah Sidang, 1995:398-417)

